

ABSTRAK

Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan umum atau biasa disebut pengadilan negeri. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 merombak total sistem penyelesaian perburuhan yang telah ada sebelumnya. Undang-undang ini membagi perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbeda dengan penyelesaian gugatan pada pengadilan negeri pada umumnya, dimana dalam setiap pengajuan permohonan gugatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial para pihak harus melampirkan risalah yang dikeluarkan oleh mediator atau konsiliator. Untuk mendapatkan risalah yang dikeluarkan mediator atau konsiliator para pihak harus melalui yang namanya bipartit.

Akibat hukum bagi tidak dipenuhinya syarat melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh mediator atau konsiliator tersebut menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, maka gugatan yang diajukan akan dikembalikan oleh hakim kepada penggugat. Pengembalian gugatan kepada penggugat merupakan kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada hakim yang memeriksa dan mengadili semua jenis perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Risalah, Mediasi dan Konsiliasi.

ABSTRACT

Industrial relations court is a special court that is currently on the scope of the so-called general court or the district court. Law number. 2 of 2004 overhauled labor settlement system that existed before. This legislation divides into four kinds of industrial disputes, ie disputes over rights, conflict of interest, termination of employment disputes and disputes between trade unions within one company.

Settlement of industrial disputes in contrast to the state court lawsuit settlement in general, which in any filing a lawsuit in the settlement of industrial disputes the parties must attach the minutes issued by mediator or conciliator. To get treatise issued mediator or conciliator the parties have to go through the name of bipartite.

Legal consequences for non-compliance with the terms attaching the minutes of settlement of industrial disputes issued by the mediator or conciliator in accordance with the provisions of Article 83 paragraph (1) Law number 2 of 2004, the lawsuit filed by the judge will be returned to the plaintiff. Returns lawsuit against the plaintiff an obligation imposed laws to judges who examine and adjudicate all kinds of industrial disputes.

Keywords: Industrial Disputes, Minutes, Mediation and Conciliation.

